

3

TINJAUAN WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

3.1. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Lokasi Bioskop Komunitas

3.1.1. Kondisi Umum Daerah Istimewa Yogyakarta¹

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu provinsi dari 33 provinsi di wilayah Indonesia dan terletak di pulau Jawa bagian tengah. Daerah Istimewa Yogyakarta di bagian selatan dibatasi Lautan Indonesia, sedangkan di bagian timur laut, tenggara, barat, dan barat laut dibatasi oleh wilayah provinsi Jawa Tengah yang meliputi: Kabupaten Klaten di sebelah Timur Laut, Kabupaten Wonogiri di sebelah Tenggara, Kabupaten Purworejo di sebelah Barat, Kabupaten Magelang di sebelah Barat Laut.



Gambar 33. Peta Wilayah D.I. Yogyakarta.

Sumber: <https://agnazgeograph.wordpress.com/category/geografi-everywhere/download-peta-buta-indonesia/>

Posisi D.I. Yogyakarta yang terletak antara 7.33'- 8.12' Lintang Selatan dan 110.00' - 110.50' Bujur Timur, tercatat memiliki luas 3.185,80 km² atau 0,17 persen dari luas Indonesia (1.860.359,67 km²), merupakan provinsi terkecil setelah Provinsi DKI

¹Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka, <http://yogyakarta.bps.go.id/>

Jakarta, yang terdiri dari: Kabupaten Kulonprogo dengan luas 586,27 km² (18,40 persen), Kabupaten Bantul dengan luas 506,85 km² (15,91 persen), Kabupaten Gunungkidul dengan luas 1.485,36 km² (46,63 persen), Kabupaten Sleman dengan luas 574,82 km² (18,04 persen), dan Kota Yogyakarta dengan luas 32,50 km² (1,02 persen).

Berdasarkan peraturan Rencana Tata Ruang dan Wilayah DIY, arah pengembangan wilayah DIY secara garis besar diterapkan sebagai berikut:

- A. **Kodya Yogyakarta**, diarahkan berfungsi secara mantap sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, industri, perusahaan, kerajinan, pendidikan, dan pengembangan wisata.
- B. **Kabupaten Sleman**, diarahkan sebagai daerah pertanian tanaman pangan, tanaman perdagangan dan hortikultura serta pengembangan pendidikan, industri, dan pariwisata.
- C. **Kabupaten Bantul**, diarahkan sebagai daerah pertanian, perdagangan, dan pariwisata.
- D. **Kabupaten Gunungkidul**, diarahkan sebagai daerah pertanian, pengembangan, tenaga kerja, tanaman, perdagangan, peternakan, dan kerajinan.
- E. **Kabupaten Kulon Progo**, diarahkan sebagai daerah pertanian, perdagangan, dan hortikultura, pertambangan, pariwisata dan industri.

3.1.2. Potensi DIY sebagai lokasi Bioskop Komunitas

Yogyakarta merupakan daerah yang cocok untuk dijadikan tempat diadakannya bioskop yang bermotif kultural karena sesuai dengan spesialisasi kota, nyata memiliki populasi ekshibitor yang layak, serta memiliki apresiator film yang cenderung terbuka terhadap tawaran – tawaran baru maupun unik. Yogyakarta sebagai kota pelajar, kota seni dan budaya memiliki banyak fasilitas lembaga intelektual, kesenian, kebudayaan, hidup berkelanjutan di Yogyakarta, yang mungkin sulit dicapai di kota lain. Tumbuhnya fasilitas – lembaga tersebut berlangsung secara organik, terdesentralisasi, dan sering dipelopori oleh individu atau kelompok secara swadaya. Prilaku masyarakat Yogyakarta yang serius melanggengkan segala bentuk kegiatan intelektual, seni dan budaya merupakan modal berharga bagi pengadaan dan penjamin keberlanjutan hidup bioskop nantinya.

Yogyakarta di masa lampau pernah menjadi kota apresiator film. Hal ini terbukti dengan sempat banyaknya bioskop di Yogyakarta yang hingga tahun 1997, berjumlah keseluruhan 28 bioskop. Berangsur-angsur sejak krisis moneter di sekitar tahun tersebut, bioskop-bioskop di Yogyakarta mulai bangkrut hingga menyisakan dua bioskop saja pada rentang 5 tahun belakangan. Jejak yang tersisa dari hingar bingar

perbioskopian Yogyakarta dapat ditelusuri dari beberapa bioskop legendaris yang masih bertahan seperti Bioskop Permata di Jalan Kusumanegara dan Bioskop Indra yang berdiri tepat di seberang pasar Beringharjo.

Ada 3 bioskop yang saat ini aktif beroperasi di D.I. Yogyakarta. Ketiga bioskop tersebut sama – sama dikelola oleh grup bioskop 21, yaitu Ambarukmo XXI, Empire XXI, dan Jogja City XXI. Ambarukmo XXI mengambil ruang tenant di Plaza Ambarukmo, Jogja City XXI mengambil ruang tenant di Jogja City Mall dan Empire XXI merupakan bangunan individual yang bertempat di Jl. Laksda Adisucipto.

Tabel 14. Bioskop Aktif Beroperasi di Jogja 2014-2015.

No	Nama Bioskop	Alamat
1	Ambarukmo XXI	Plaza Ambarukmo Lantai 2 Jl. Laksda Adi Sucipto KM 6, Sleman
2	Empire XXI	Jl. Urip Sumoharjo no 104 Yogyakarta
3	Jogja City XXI	Jogya City Mall Lt.2 Jl. Magelang KM. 6 No.18 Sleman

Sumber: Penelusuran Penulis

Bioskop Ambarukmo XXI dan Empire XXI memiliki sasaran yang berbeda dalam hal segmentasi pasar. Mengincar pasar apresiator yang lebih serius memburu film ketimbang. Empire XXI lebih berkesan eksklusif dengan fungsi pendukung yang lebih bermuatan *leisure* daripada Ambarukmo XXI yang bercitra ringkas, dengan fungsi pendukung *game center*. Untuk kelas pasar yang lebih tinggi, grup 21 sebenarnya memiliki konsep bioskop The Premiere. The Premiere umumnya mengambil satu ruang pemutaran di komplek bioskopnya dengan spesifikasi yang tinggi. Konsep The Premiere dalam waktu dekat akan diterapkan di Ambarukmo XXI dan Empire XXI. Baik Ambarukmo XXI maupun Empire XXI sama-sama dijalankan dengan konsep dasar Cineplex (multi layar). Sejumlah 5 ruang pemutaran untuk Ambarukmo XXI dan 6 ruang pemutaran untuk Empire XXI. Kapasitas masing-masing ruang pemutaran berlaku sama, yaitu 200 orang. Jika konsep The Premier masuk, kapasitas 1 ruang pemutaran akan menyusut menjadi 50-100 orang.

Seiring dibangunnya 3 pusat perbelanjaan besar di Yogyakarta, Hartono Lifestyle Mall, Sahid Yogya *Lifestyle City*, dan Malioboro City, jumlah bioskop di tahun 2015 - 2016 meningkat dengan jumlah yang sama. Bioskop baru yang akan ada dalam kurun waktu dua tahun ke depan adalah 1 bioskop grup 21, 1 bioskop Blitzmegaplex dan 1 bioskop Cinemaxx. Meskipun kehadiran bioskop - bioskop baru tersebut akan mengambil porsi pasar apresiator secara umum umum, sasaran utama bioskop yang akan diadakan dinilai tidak terlalu terpengaruh signifikan karena kelompok ekshibitor film bukanlah pasar bagi bioskop komersil.

Dinilai dari pengamatan langsung di Empire XXI dan AmbarukmoXXI, besar kecilnya pengunjung bioskop bergantung pada popularitas film yang sedang diputar maupun siklus *weekends-weekdays* yang dibedakan harga tiketnya. Tarif yang berlaku sampai saat ini 35.000 rupiah untuk *weekdays* (Senin-Kamis) dan 50.000 rupiah untuk *weekends* (Jumat-Minggu). Fenomena yang menarik terkait segmen pelajar adalah segmen ini tidak terlalu terikat siklus *weekends-weekdays* untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk menonton film di bioskop. Kontras dengan kebanyakan pengunjung bioskop di kota-kota besar, keputusan tersebut lebih didasari pada kondisi harga tiket termurah.

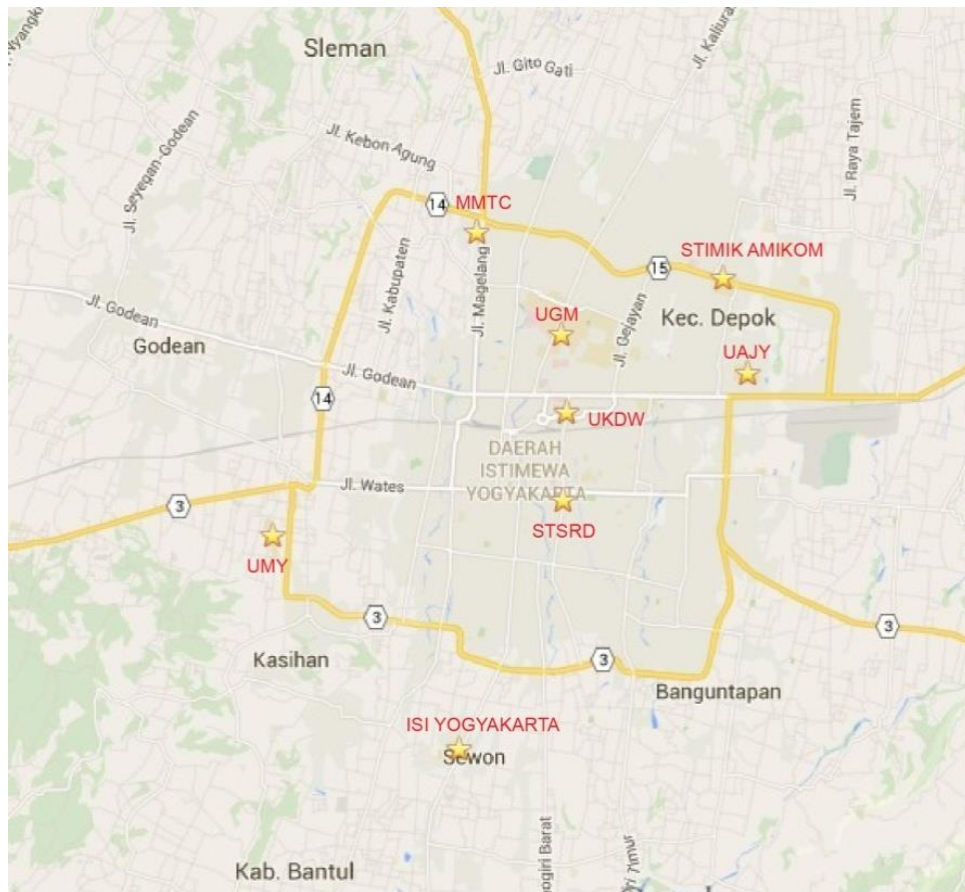
3.1.3. Persebaran Potensi Pengunjung Bioskop Komunitas

Komunitas film yang lahir dan berkembang di Yogyakarta berasal dari banyak institusi pendidikan tinggi. Komunitas film yang berkembang di kampus tersebut ada yang memiliki jurusan perfilman (televisi & media rekam) dan juga tidak. Komunitas kampus yang memiliki jurusan perfilman selalu menghasilkan film setiap semesternya. Kine klub yang berkembang di kampus non jurusan perfilman juga sering membuat produksi film tidak berhenti di level apresiasi saja.

Tabel 15. Komunitas film yang berkembang di universitas-universitas Yogyakarta.

No	Kampus dengan Jurusan Perfilman	Kampus non Jurusan Perfilman
1	Institut Seni Yogyakarta (ISI)	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)
2	Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain (STSRD)	Duta Wacana Yogyakarta (UKDW)
3	Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) MMTC Yogyakarta	Universitas Gadjah Mada (UGM)
4	Sekolah Tinggi Ilmu komputer (STMIK) AMIKOM Yogyakarta	FISIPOL Universitas Atma Jaya Yogyakarta UAJY

Sumber: Penelusuran Penulis



Gambar 34. Peta Persebaran Komunitas Film di Perguruan Tinggi Yogyakarta.

Sumber: Penelusuran Penulis

Komunitas pencinta film yang dibentuk di luar institusi pendidikan di Yogyakarta yang dapat diidentifikasi salah satunya adalah Forum Film Dokumenter. Komunitas pecinta film diisi oleh individu-individu pembuat film sendiri ataupun pencinta film dengan berbagai latar belakang. Komunitas seperti ini umumnya menjadi unsur kritik perfilman yang penting untuk pembacaan pasar penonton film. Selain itu, terdapat lembaga kebudayaan asing seperti Lembaga Indonesia Prancis dan Goethe Institute (Jerman) yang kerap mengadakan program apresiasi film dan festival film bertema negara masing-masing.

Festival film yang ada di Yogyakarta antara lain *Jogja Netpac Asian Film Festival* (JAFF), Festival Film Dokumenter (FFD), Festival Film Pelajar, Pekan Film Yogyakarta, Festival Film Perancis, Festival Film Jerman. FFD dan JAFF merupakan dua festival film yang penting bagi perfilman Indonesia dengan jangkauan pengaruh meliputi region Asia Tenggara. FFD merupakan festival film tertua di Indonesia yang lahir di tahun 2002 dengan spesialisasi film dokumenter. Sedangkan JAFF lahir di tahun 2005 dengan spesialisasi film fiksi yang melibatkan sineas se-Asia. Pertumbuhan film independen dalam negeri dengan indikator kategori film panjang dapat dilacak berdasarkan database

yang dimiliki festival-festival film ini, karena setiap tahunnya semua festival tersebut menyelenggarakan program kompetisi.

3.1.4. Ruang-Ruang Pemutaran Independen di Yogyakarta

Kegiatan-kegiatan ekshibisi film di Yogyakarta selama ini bergerilya dari ruang ke ruang yang bukan secara khusus diperuntukkan bagi pemutaran film. Ruang pemutaran umumnya mengambil gedung -gedung auditorium yang sudah ada di Yogyakarta seperti gedung pertunjukan, auditorium kampus, selain itu juga dilakukan di ruang-ruang publik. Para ekshibitor kerap kali harus berkompromi dengan situasi ruang yang tidak kondusif, yang menghambat mereka untuk memberlakukan ticketing pada apresiator.²

Beberapa ekshibitor lainnya mengalihkan bentuk ekshibisi filmnya ke dalam medium internet, melalui situs youtube atau vimeo. Seperti yang dilakukan X-Code dengan serial 'Toni Blank' sejak tahun 2009.

Pada acara Festival Film biasanya pihak penyelenggara menyewa sebuah gedung untuk pemutaran dan diskusi film. Lokasi yang sering disewa untuk penyelenggaraan festival film di Yogyakarta antara lain di Empire XXI, Taman Budaya, dan Auditorium LIP.



Gambar 15. Pelaksanaan FFD 2010 di Societed Hall, Taman Budaya Yogyakarta.
Sumber: doc penulis.

²Wawancara dengan F.Apriwan, direktur FFD.



Gambar 36. Pelaksanaan FFD 2010 di Benteng Vredenburg.
Sumber: doc penulis.

3.2. Kabupaten Sleman sebagai lokasi Bioskop Komunitas

Kabupaten Sleman merupakan daerah yang diarahkan sebagai daerah pengembangan pendidikan, industri, dan pariwisata; untuk itu daerah Sleman cocok digunakan untuk lokasi Bioskop Alternatif. Selain itu banyaknya perguruan tinggi yang berada di Sleman merupakan pertimbangan utama karena mayoritas pengunjung diperkirakan adalah para mahasiswa.

3.2.1. Kondisi Geografis Wilayah Kabupaten Sleman³

Sleman merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Sleman 7574,82 Km² atau 18% dari luas wilayah DIY, terbentang di antara 110°33'00" dan 110°13'00" Bujur Timur, serta 7°34'51" dan 7°47'03" Lintang Selatan.

Wilayah Kabupaten Sleman memiliki ketinggian antara 100 meter hingga 2.500 meter di atas permukaan laut. Bagian selatan relatif datar dengan peruntukan utama sebagai lahan pertanian, industri, dan permukiman, sedangkan bagian utara merupakan lereng gunung Merapi yang memiliki banyak potensi sumber air. Di lereng selatan Gunung Merapi terdapat dua buah bukit, yaitu Bukit Turgo dan Bukit Plawangan yang

³ <http://www.slemankab.go.id/215/geografis.slm>

merupakan bagian dari kawasan wisata Kaliurang. Beberapa sungai yang mengalir melalui Kabupaten Sleman menuju Pantai Selatan antara lain Sungai Progo, Krasak, Sempor, Nyoho, Kuning dan Boyong.

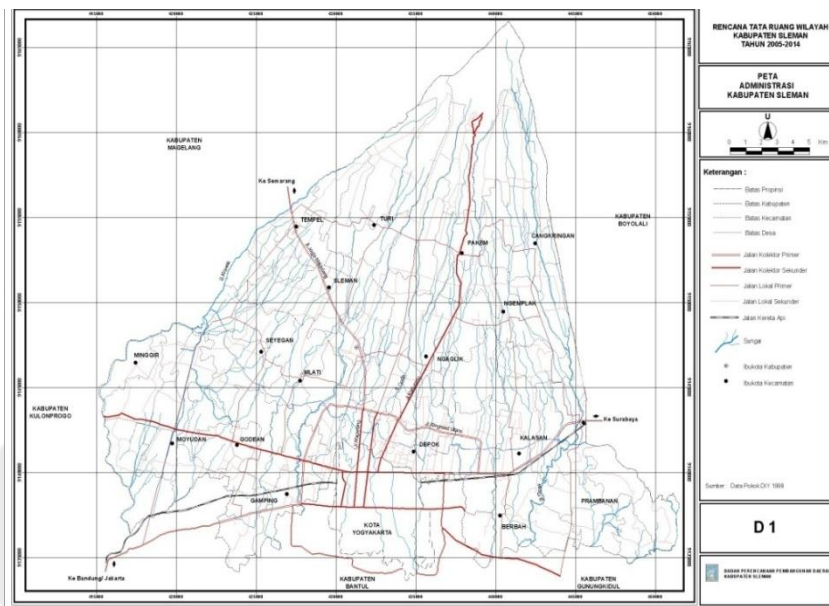
3.2.2. Wilayah Administratif Kabupaten Sleman

Di sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kuloprogo dan Kabupaten Magelang, dan di sebelah selatan berbatasan dengan kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul. Secara administratif, terbagi atas 17 kecamatan 86 desa, dan 1.212 padukuhan.

Tabel 16. Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Sleman.

No	Kecamatan	Banyaknya		Luas (Ha)
		Desa	Dusun	
1	Moyudan	4	65	2.762
2	Godean	7	57	2.684
3	Minggir	5	68	2.727
4	Gamping	5	59	2.925
5	Seyegan	5	67	2.663
6	Sleman	5	83	3.132
7	Ngaglik	6	87	3.852
8	Mlati	5	74	2.852
9	Tempel	8	98	3.249
10	Turi	4	54	4.309
11	Prambanan	6	68	4.135
12	Kalasan	4	80	3.584
13	Berbah	4	58	2.299
14	Ngemplak	5	82	3.571
15	Pakem	5	61	4.384
16	Depok	3	58	3.555
17	Cangkringan	5	73	4.799
	Jumlah	86	1.212	57.482

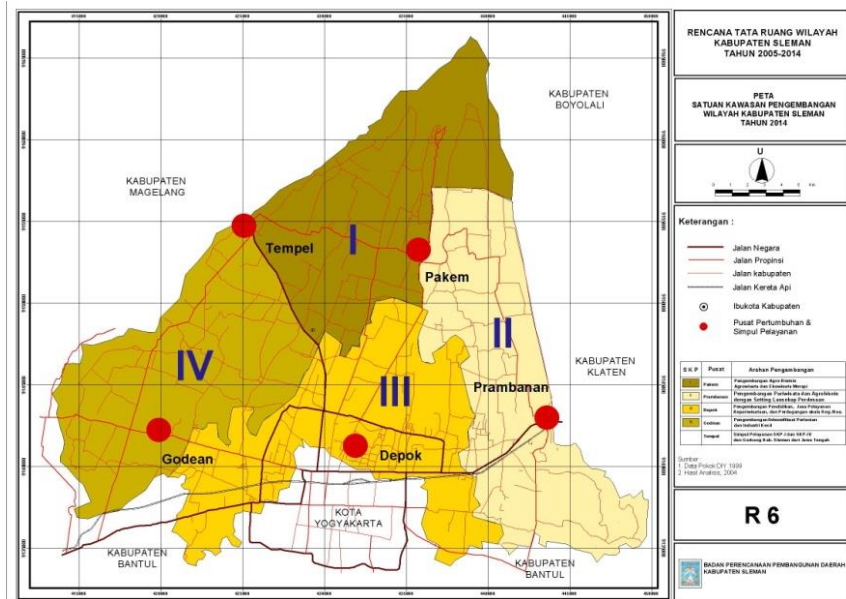
Sumber: <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/>



Gambar 37. Peta Administrasi Kabupaten Sleman.
Sumber:Perda DIY wilayah Sleman/RTRW Sleman Th.2014.

3.2.3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman

Berdasarkan peta SatuanKawasan Pengembangan Wilayah Kabupaten Slemantahun2014, dibagi menjadi 4 Satuan Kawasan Pengembangan yaitu: SKP I sebagai Pengembangan Agrobisnis Agrowisata dan ekowisata Merapi, SKP II Pengembangan Pariwisata dan Argobisnis dengan setting Lansekap Perdesaan, SKP III Pengembangan Pendidikan, Jasa Pelayanankepariwisataan, danperdagangan skala regional/Nasional, dan SKP IV untuk Pengembangan/Intensifikasi Pertanian dan Industri kecil.



Gambar 38. Peta Satuan Kawasan Pegembangan Wilayah Kabupaten Sleman.
Sumber: Perda DIY wilayah Sleman/RTRW Sleman Th.2014

Kawasan yang sesuai untuk proyek bioskop alternatif adalah wilayah yang masuk di dalam SKP III yang diperuntukan untuk pengembangan Pendidikan, Jasa Pelayanankepariwisataan, danperdagangan skala regional/Nasional.

Kecamatan yang masuk dalam SKP III meliputi Kecamatan Depok, Kecamatan Mlati, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Sleman, dan Kecamatan Godean.

3.3. Pemilihan Lokasi dan Tapak

3.3.1. Kriteria Pemilihan Lokasi

Lokasi yang dibutuhkan untuk Bioskop Komunitas yang utama adalah akses. Lokasi bioskop harus berada di dalam radius 5 km dari pusat kota mudah dijangkau oleh para pecinta film independen. Selain itu, lokasi juga berada di tengah lokasi-lokasi para komunitas pecinta film independen. Lokasi Bioskop Alternatif ini diharapkan mampu menjadi pusat komunitas-komunitas film yang ada di Yogyakarta.

Ada beberapa kriteria lain yang juga diperlukan dalam pemilihan lokasi selain pertimbangan akses. Ketersediaan tapak yang memiliki luas area 5.000 – 10.000 m². Selain itu juga tersedia jaringan listrik dan telepon untuk penunjang operasional bioskop.

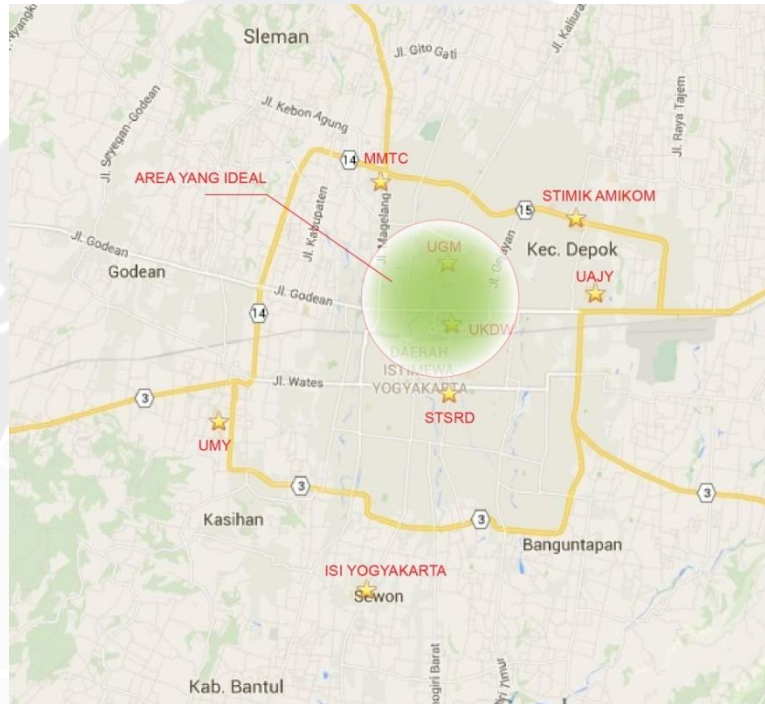
Tabel 17. Kriteria pemilihan lokasi dan tapak.

No	Kriteria
1	Lokasi berada di dalam radius 5 km dari pusat kota
2	Akses jalan untuk mobil dan kendaraan lain memadai untuk mencapai site.
3	Luas site 5.000 – 10.000 m ²
4	Berada dapat dijangkau semua komunitas film di D.I. Yogyakarta.

Sumber: analisis penulis.

3.3.2. Pemilihan Tapak

Bioskop Komunitas diharapkan menjadi pusat para pecinta film-film independen, sehingga lokasi harus dapat dijangkau oleh semua komunitas pencinta film independen yang berada di Yogyakarta.



Gambar 39. Area Pemilihan Lokasi Bioskop Alternatif.
Sumber: <https://maps.google.com>

Dari hasil survey yang dilakukan oleh penulis lokasi yang memenuhi kriteria-kriteria untuk Bioskop Alternatif ini berada di sekitar Kampus UGM. Di sana masih tersedia site yang memungkinkan untuk dibangun bioskop. Ada 2 site yang dapat dijadikan sebagai lokasi Bioskop Alternatif yang akan dirancang. Kedua site tersebut berada di dekat jembatan Pogung kawasan Fakultas Teknik UGM.



Gambar 40. Alternatif Site I dan II.

Sumber: <https://maps.google.com>

Site I merupakan area sawah di Jl. Teknik Utara yang berbatasan dengan permukiman dan sungai. Kondisi kontur tanah relatif datar dan memiliki luas tanah 10.646,21 m². Sedangkan Site II merupakan lahan kering yang berada di Jl. Monjali dan berbatasan langsung dengan sungai. Luas area Site II berkisar 10.741,07 m².



Gambar 41. Site I.

Sumber: doc. penulis



Gambar 42. Site II.
Sumber: doc. penulis



Gambar 43. Kondisi Site I.
Sumber: doc. penulis



Gambar 44. Kondisi Site II.
Sumber: doc.penulis

Dari kedua site tersebut dipilih satu site yang paling relevan untuk bioskop alternatif. Site I menjadi site terpilih karena pertimbangan kemudahan akses pengunjung seperti parkir kendaraan maupun pergerakan pengunjung. Kemudahan akses merupakan salah satu kunci dalam penciptaan ruang demokratis yang akan diterapkan pada Bioskop Komunitas.

3.4. Peraturan Pemerintah Terkait Proyek dan Lokasi

3.4.1. Alokasi Guna Tapak

Materi site plan bioskop harus memenuhi persyaratan telah ditetapkan , terdiri atas:

- a) Prasarana lingkungan meliputi:
 1. jalan setapak dan koridor;
 2. saluran pembuangan air hujan;
 3. peresapan air hujan;
 4. saluran pembuangan air limbah;
 5. peresapan air limbah;
 6. tempat/bak sampah;
 7. instakasi pemadam kebakaran;
 8. tangga darurat;
- b) Fasilitas lingkungan, minimal meliputi:
 9. tempat parkir;
 10. tempat pedagang kecil/informal;
 11. ruang terbuka hijau/taman;

- c) Fasilitas ruang dan bangunan, minimal meliputi :
1. ruang studio dan perlengkapannya;
 2. ruang pengelola;
 3. ruang tunggu/lobby;
 4. pos jaga/kemanan;
 5. kamar mandi/WC;
 6. ruang ibadah;
 7. pintu darurat;
 8. tangga darurat untuk bangunan lebih dari 2 lantai.
- d) Persyaratan lingkungan, meliputi:
1. KDB, KLB, dan KDH;
 2. sempadan jalan, sungai, irigasi, kereta api, listrik tegangantinggi, mata air; ruang bebas terhadap cagar budaya dan ketinggian bangunan.

Bangunan harus memenuhi persyaratan KDB berdasarkan tingkat kepadatan lokasi meliputi:

- a) bangunan gedung di lokasi renggang dengan KDB 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 45% (empat puluh lima persen);
- b) bangunan gedung di lokasi sedang dengan KDB diatas 45% (empat puluh lima persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen);
- c) bangunan gedung di lokasi padat dengan KDB diatas 60% (enam puluh persen).

RTHP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) luas RTHP yang wajib disediakan sebagai berikut:
 1. KDH paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas tanah untuk nilai KDB 0% (nol persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen);
 2. KDH paling sedikit sebesar 20% (duapuluh persen) dari luas tanah untuk nilai KDB 31% (tiga puluh satu persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen); 27;
 3. KDH paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari luas tanah untuk nilai KDB 71% (tujuh puluh satu persen) sampai dengan 100% (seratus persen).
- b) lahan yang memiliki nilai KDB antara 71% (tujuh puluh satu persen) sampai dengan 100% (seratus persen), pemenuhan luas RTHP dapat diganti dengan penyediaan tanaman dalam pot atau *roof garden*; (3) Penyediaan tanaman dalam pot atau *roof garden* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperhitungkan sebagai bagian dari KDH yang luasnya paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari luas tanah.

Tabel 18. Standar jumlah parkir yang wajib disediakan untuk Bioskop di Sleman.

No	Kelas Bioskop	Standar Parkir 1 (Satu) Mobil
1	Kelas A-I	Setiap 7 kursi
2	Kelas A-II	Setiap 10 kursi
3	Kelas A-III	Setiap 15 kursi

Sumber: Peraturan Bupati Sleman Nomor : 18 /Per.Bup/A/2005

3.4.2. Batas-Batas Tapak

3.4.2.1. Garis Sempadan Jalan

- a) Jalan Nasional jarak bangunan dari as jalan 29m
 1. jalan Jogja – Prambanan
 2. jalan Jogja – Tempel
 3. jalan Jogja – wates
 4. jalan Arteri
- b) Jalan Nasional (fungsi kolektor primer), jarak bangunan dari as jalan 23m, meliputi, jalan Jogja – Wonosari
- c) Jalan Propinsi jarak bangunan dari as jalan 17,5m
 1. jalan Jogja – Kaliurang
 2. jalan Jogja – Puluwatu
 3. jalan Jogja – nanggulan
 4. jalan Temple – Klanggon
 5. jalan Tempel – Pakem
 6. jalan Pakem Prambanan
 7. Jalan Prambanan – Piyungan
- d) Daerah tepi lingkungan jalan kabupaten, jarak bangunan dari as jalan 11,5m
 1. Antar lingkungan (A) dan (B), 9m dan 8m
 2. Jl. lingkungan I jalan desa, jarak bangunan dari as jalan 6m
 3. Jl. lingkungan II, jarak bangunan dari as jalan 5,5m
 4. Jl. lingkungan III antar rumah, jarak bangunan dari as jalan 5m
 5. Jl. lingkungan IV, jarak bangunan dari as jalan 4,5m
 6. Jl.kampung/pedesaan, jarak bangunan dari as jalan 3,5

3.4.2.2. Garis Sempadan Sungai:

- a) garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan paling sedikit 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
- b) garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kakitanggul;

- c) garis sempadan sungai tak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada:
 - 1. sungai besar dan/atau DAS lebih dari 500 (lima ratus) kilometer persegi ditetapkan paling sedikit 100 (seratus) meter dihitung dari tepi sungai; dan
 - 2. sungai kecil dan/atau DAS kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) kilometer persegi ditetapkan paling sedikit 50 (limapuluh) meter dihitung dari tepi sungai.
- d) garis sempadan sungai tak bertanggung di dalam kawasan perkotaan yang mempunyai kedalaman kurang dari 3 (tiga) meter, ditetapkan paling sedikit 10 (sepuluh) meter, dihitung dari tepi sungai;
- e) garis sempadan sungai tak bertanggung di dalam kawasan perkotaan yang mempunyai kedalaman antara 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, ditetapkan paling sedikit 15 (lima belas) meter, dihitung dari tepi sungai; dan
- f) garis sempadan sungai tak bertanggung di dalam kawasan perkotaan dengan kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, ditetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) meter, dihitung dari tepi sungai.

